

# PENCEGAHAN SIKAP INTOLERANSI PADA SISWA MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN PANCASILA (Studi Kasus SMA PABA Binjai)

Saiful Amir, Andy Hakim

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara

E-mail: amirsaiful357@gmail.com

## ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir muncul beberapa studi yang menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat toleransi di Indonesia. Salah satu diantara sikap yang mengarah kepada nilai intoleransi yaitu munculnya gerakan radikalisme, berita bohong (*hoax*), persekusi. Bahkan ditingkat pelajar Sekolah Menengah Atas, nilai intoleransi muncul dalam bentuk bullying, perbedaan berdasarkan agama, suku dan lainnya. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, yang berdampak pada sikap intoleran di kalangan pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pencegahan sikap intoleransi melalui penguatan pendidikan Pancasila serta faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan pendidikan Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan pencegahan sikap intoleransi dikalangan siswa Sekolah Menengah Atas dilakukan melalui pendalaman Kurikulum 13 dan pendekatan budaya literasi. Adapaun faktor pendukung diantaranya: kebijakan pemerintah yang memberikan aturan tentang adanya penanaman nilai-nilai toleransi beragama, kerjasama antar warga sekolah dalam kegiatan keagamaan. Faktor penghambatnya yaitu: latar belakang keluarga, lingkungan masyarakat, tingkat kemampuan, kematangan emosional siswa yang tidak sama, pengaruh media sosial, dan hubungan pertemanan

*Kata Kunci: Toleransi, Intoleransi, Pendidikan*

## PENDAHULUAN

Secara sosiologis bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat multikultural yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman inilah bangsa Indonesia terbentuk (Rini Fidiyani 2013). Keberagaman ini tidak hanya terbatas pada budaya dan etnik, melainkan juga agama yang keseluruhannya di rangkum dalam nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan. Dalam hal keragaman agama, toleransi antar umat beragama merupakan modal sosial yang menjadi kunci keberhasilan Indonesia, dan harus terus dipelihara untuk menjaga

keutuhan Indonesia. Seiring dengan kemajuan jaman, arus informasi dan teknologi begitu cepat berpengaruh pada perubahan pemikiran dan perilaku masyarakat, termasuk juga dalam me-mahami ajaran agama. tidak dapat ditutupi bahwa fenomena perubahan kemajuan teknologi dan informasi membawa dampak negatif seperti isu-isu SARA, berita bohong (*hoax*), gerakan radikal dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

The Wahid Institute mencatat pada 2016, sebanyak 204 peristiwa dengan 315 tindakan terhadap pelanggaran kebebasan beragama. Jumlah ini naik 7% pada 2015

(Wahidfoundation.org, Laporan tahunan 2016). Sedangkan menurut catatan peneliti SETARA Institut angka pelanggaran kebebasan beragama sepanjang tahun 2016 terjadi 208 peristiwa dengan 270 tindakan. Sementara, pada tahun 2017 ada 151 peristiwa dengan 201 tindakan. Dari angka tersebut, terjadi penurunan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama sebanyak 53 peristiwa dan 69 tindakan pada tahun 2017, jika dibandingkan tahun 2016. Meski, demikian, angka peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama tersebut dianggap para peneliti masih tinggi, karena diatas angka 100 (Setara Institute.org. 2017).

Banyak faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan agama salah satunya adalah pemahaman agama yang bersifat ekstrinsik atau menggunakan agama sebagai alat mencapai tujuan yang bukan tujuan agama itu sendiri, melainkan kepentingan pribadi atau menggunakan agama untuk mencapai kedudukan sosial dan kekuasaan. Tidak hanya itu pemahaman terhadap kebhinekaan yang terangkai dalam nilai-nilai Pancasila menurun. Untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila, diperlukan pemahaman nilai-nilai tersebut melalui pendidikan dari tingkat pendidikan dasar hingga pada tingkat pendidikan tinggi (Kaelan 2014).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 2 yaitu Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengisyaratkan besarnya peran lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Para siswa harus memahami, memaknai, dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya agar dapat menjadi pedoman hidup dan dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak moral.

Pendidikan di sekolah adalah salah satu faktor utama yang dapat mem-pengaruhi pemikiran anak-anak bangsa. Gillin berpendapat bahwa fungsi pendidikan sekolah ialah penyesuaian diri anak dan stabilitasi masyarakat. Sekolah memiliki daya fungsi dalam pembentukan karakteristik siswa dalam bersikap. Salah satunya adalah fungsi dalam transmisi kebudayaan, perilaku dalam sosial/ integrasi sosial, perkembangan dan pembentukan pribadi dan lainnya. Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi proses sosialisasi dan berfungsi merumuskan kebudayaan masyarakat kepada anak.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berfungsi dalam menyiapkan generasi penerus. Dalam menanamkan dan membina sikap toleransi antara sesama siswa, terutama yang tidak seagama (juga diperlukan) hanya terbatas dalam membantu menyiapkan sarana yang diperlukan untuk upacara yang dimaksud, dan bukan untuk menghadiri atau melaksanakan upacara (ritual) agama tertentu.

Secara psikologis siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah individu yang berada pada masa remaja, dimana masa bergejolak (*sturm and drang*). Remaja cenderung bersikap progresif dan terus ingin mencoba dan berubah. Secara psikologis, siswa yang pada umumnya berumur dari 15-17 tahun yang tergolong dalam masa remaja awal, biasanya masih memiliki sikap ikut-ikutan menjadi salah satu sikap positif yang terbentuk dalam sikap tenggang rasa. Sikap ingin tahu yang memunculkan pada siswa dapat memotivasi untuk menjalin hubungan dengan teman-teman lain yang seagama ataupun beda agama, dan bukan hanya itu saja, melainkan berbagai perbedaan yang ada di kalangan siswa.

Keadaan seperti ini juga terjadi pada siswa SLTA PABA Binjai. Dimana para siswa sering, memperlihatkan keadaan perbedaan pendapat dan pandangan yang berbeda, yang muncul dari para siswa itu sendiri. Dari sisi lain ini juga terjadi akibat dinamika dan transformasi sosial yang ditimbulkan oleh globalisasi dan modernisasi yang berimplikasi terhadap sikap dan tingkah laku siswa yang menyebabkan nilai-nilai kebersamaan dan keterbukaan menjadi luntur.

Bertolak dari latar belakang di atas bagaimana proses pencegahan sikap intoleransi melalui penguatan pendidikan Pancasila serta faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan pendidikan Pancasila.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pencegahan sikap intoleransi melalui penguatan pendidikan Pancasila serta faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan pendidikan Pancasila di SLTA PABA Binjai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pe-wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2008:135). Wawancara digunakan untuk menjangkau data atau informasi yang berkaitan dengan proses pencegahan sikap intoleransi. Observasi yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data tentang proses pencegahan sikap intoleransi.

Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data. Pengujian itu dilakukan dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerantia*, berarti kelonggaran kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan kelembutan. Terdapat dua penafsiran dalam memaknai toleransi. Pertama, penafsiran bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang lain atau kelompok. Kedua, penafsiran bersifat positif yaitu dengan mengatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar membiarkan melainkan adanya dukungan keberadaan orang lain atau kelompok. Dalam toleransi terdapat beberapa butir refleksi, yaitu:

- 1) Kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metodenya.
- 2) Toleransi adalah terbuka dan resetif pada indahny keberagaman
- 3) Tolereansi menghargai individu dan perbedaan, menghapus ke egoan dan ketegangan yang disebabkan ketidak pedulian. Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan kebangsaan, agama dan apa yang diwariskan

- 4) Melalui pengertian dan keterbukaan orang yang toleran melakukan orang lain secara berbeda, dan menunjukkan toleransi.

Dalam toleransi terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengeskpresikan terhadap orang lain. Unsur tersebut adalah:

Pertama, memberikan kebebasan dan Kemerdekaan. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga dalam memilih agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak lahir sampai ia meninggal, dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain.

Kedua, mengakui hak setiap orang. Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya sendiri. Hal ini tentunya tidak melanggar hak orang lain. Jika demikian ini terjadi maka akan menimbulkan kekacauan.

Ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Dalam konteks ini, di berlakukan bagi toleransi antar agama, namun apabila dikaitkan dalam toleransi sosial, maka menjadi menghormati keyakinan orang lain dalam suatu kelompok. Misalnya pengambilan keputusan seseorang untuk memilih dalam organisasi. Sebagai individu yang toleran seseorang harus menghormati keputusan orang lain yang berbeda dengan organisasi.

Keempat, saling mengerti. Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling mencurigai dan saling membenci serta saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling menghargai antara satu dengan yang lain.

Kebalikan dari nilai-nilai toleran adalah intoleran yang dapat diartikan secara sederhana tidak menghargai perbedaan antara sesama baik dari sisi agama, etnis ataupun yang lainnya sehingga dapat menimbulkan kebencian bahkan kekacauan. Jika sikap intoleran terus terjadi tanpa ada upaya kesadaran diri, dapat berakibat konflik sosial yang mengarah pada proses disintegrasikan bangsa.

Banyak faktor yang dapat menimbulkan sikap dan perilaku intoleran, akan tetapi agama bukan merupakan sumber dari penyebab intoleran itu sendiri melainkan pemahaman yang bersifat intrisik terhadap ajaran agama itu sendiri. Sikap eksklusifisme yang berlebihan menimbulkan gerakan-gerakan yang mengarah kepada perbuatan intoleran.

Lingkungan pendidikan juga secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi sikap toleransi. Kondisi lingkungan pendidikan yang memadai meminimalisir terjadinya sikap dan perbuatan siswa yang dapat mengarah intoleransi. Sikap itu diantaranya *Bullying*, tidak adanya penghormatan terhadap sesama, melakukan tindakan yang tidak adil dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan pendidikan tentunya di dasarkan pada Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, memperluas, dan menetapkan suatu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dalam hal ini pembinaan sikap toleransi antar siswa sangat berperan penting dalam pengamalan Pancasila.

### **Penerapan Kurikulum 2013 dan budaya literasi**

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan mulai tahun 2013 dari pengembangan kurikulum sebelumnya, Kurikulum berbasis kompetensi dan Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini aspek *softskills* dan *hardskills* lebih di tekankan kepada peserta didik bertujuan untuk meningkatkan dan me-nyeimbangkan kompetensi sikap, ke-trampil, dan pengetahuan peserta didik. keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru yang akan menerapkan dan meng-aktualisasi kurikulum tersebut. Ke-mampuan guru tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Tidak dapat dinafikan bahwa kegagalan penerapan kurikulum di sebabkan oleh kemampuan, keterampilan dan pengetahuan guru dalam melaksanakan pengajaran sesuai dengan bidangnya.

Pendalaman Pendidikan Pancasila dilakukan secara *continuous action-reflection* aksi dan refleksi

berkelanjutan. Adapun yang menjadi point penting dalam penguatan pendidikan Pancasila yaitu:

- a. Materi disajikan tidak berdasarkan pada pengelompokkan menurut empat pilar kebangsaan tetapi berdasarkan keterpaduan empat pilar dalam pembentukan karakter bangsa
- b. Materi disajikan berdasarkan kebutuhan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab (taat norma, asas, dan aturan)
- c. Adanya kompetensi yang dituntut dari siswa untuk melakukan tindakan nyata sebagai warga negara yang baik
- d. Pancasila dan Kewarganegaraan bukan hanya pengetahuan, tetapi ditunjukkan melalui tindakan nyata dan sikap keseharian.

Sebagai upaya penguatan Pendidikan Pancasila selain pendalaman Kurikulum 2013 dilakukan juga melalui budaya literasi. Budaya literasi merupakan kebiasaan keberaksaraan yaitu kemampuan membaca dan menulis. Budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya. Tidak hanya sekedar membaca untuk mendapatkan informasi pengetahuan, akan tetapi terdapat dimensi yang diperoleh yaitu belajar berempati dan perspektif. Menulis juga dapat mengasah kepribadian atau budi pekerti seseorang. Hal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan

masyarakat yang beragama (multikultur), dimana karakter toleransi dan empati terhadap segala perbedaan menjadi lebih indah untuk dituliskan dan dikenang oleh masyarakat. (I Made Ngurah Suragangga, 2017)

Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 telah menyadari pentingnya penumbuhan karakter peserta didik melalui kebijakan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Agar dapat terlaksana sesuai dengan aturan diatas perlu dibangun kebiasaan membaca dan bersifat gradual tidak dapat dilakukan secara temporer. Ada banyak bentuk literasi yang dapat dilakukan yaitu:

- a) Literasi Dini (*Early Literacy*) yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar. Hubungan interaksi antar sesama baik dilingkungan sekolah atau diluar sekolah menimbulkan cara pemahaman yang lebih luas.
- b) Literasi Dasar (*Basic Literacy*), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk mem-perhitungkan (*calculating*), mem-persepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan,

- serta menggambar-kan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan.
- c) Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*), antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System* sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
- d) Literasi Media (*Media Literacy*), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Dengan demikian pemanfaatan media bukan hanya sekedar sebagai alat hiburan melainkan kepada hal-hal yang bermanfaat pada siswa.
- e) Literasi Teknologi (*Technology Literacy*), yaitu kemampuan memahami ke-lengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
- f) Literasi Visual (*Visual Literacy*), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan

kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak cegah, baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital (perpaduan ketiganya disebut teks multimodal), perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun juga di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan.

Pembelajaran berbasis budaya literasi akan mengondisikan siswa untuk menjadi seorang literat. Peningkatan kemampuan literasi dalam belajar sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

#### **Faktor pendukung dan penghambat penguatan pendidikan Pancasila sebagai upaya pencegahan sikap intoleran pada siswa Sekolah Menengah Umum (SMU)**

Faktor pendukung dari upaya pencegahan sikap intoleran datang dari Pemerintah (dalam hal ini dinas pendidikan), kepala sekolah, guru, dan lingkungan sekolah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (sistem pendidikan nasional) dan Permendikbud No. 59 TAHUN

2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Aturan ini merupakan standarisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan kurikulum 2013 pada dasarnya menghasilkan individu yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Demi tercapainya standarisasi minimal pendidikan, peran kepala sekolah bertanggungjawab dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Kepala Sekolah sebagai otoritas menerjerial pendidikan juga berfungsi sebagai pengawas dari segala bentuk kegiatan pendidikan dilingkungannya. Untuk tercapainya pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Kepala sekolah membuat program-program yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila seperti kegiatan keorganisasian sekolah, pengembangan seni dan bakat siswa serta program keagamaan.

Guru sebagai pelaksana pendidikan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Kretaitas guru dituntut dalam memilih metode mengajar, mengembangkan kegiatan siswa yang mengimplementasikan nilai-nilai sila Pancasila, serta memasukkannya dalam materi pelajaran. Tidak hanya itu, peran guru juga sebagai pemberi contoh teladan kepada siswa baik dilingkungan sekolah ataupun diluar lingkungan sekolah.

Dukungan lingkungan sekolah menjadi komponen penting dalam pelaksanaan penguatan pendidikan Pancasila. Kelengkapan sarana seperti fasilitas kegiatan siswa, ruangan ibadah/musholah, ruangan pertemuan, sarana pengembangan bakat dan kesenian, sarana pembelajaran yang memadai (laboratorium/ praktek) dan sarana olah raga sebagai tempat mengaktualisasikan diri baik kepada Tuhan (tempat ibadah) atau pengembangan bakat siswa. Untuk menjaga terciptanya lingkungan kondusif pengawasan dilakukan dengan menempatkan beberapa kamera pengawas (CCTV) di setiap ruangan kelas. Ini dilakukan untuk dapat mengetahui jika di temukan perilaku siswa yang mengarah pada tindakan negatif seperti berkonflik, melakukan pengerusakan, saling menghina yang mengakibatkan adanya keributn

Dukungan antar warga sekolah yaitu tenaga kependidikan seperti pegawai perpustakaan, staf dan pegawai sekolah yang turut serta melakukan pengawasan, dan pencegahan terhadap sikap intoleran yang terjadi pada siswa, sehigga tercipta lingkungan yang kondusif. pengawasan terhadap siswa dilakukan diluar waktu pelajaran, seperti waktu kedatangan siswa, waktu istirahat dan waktu ketika siswa pulang sekolah. Tidak hanya itu peran warga sekolah juga turut memberikan contoh teladan dalam menanamkan sikap tolrean seperti memberikan nasihat kepada siswa, saling bertegur sapa sesama



pegawai dan berperan dalam kegiatan keagamaan siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dalam pelaksanaan penguatan pendidikan Pancasila di SMU PABA Binjai terjadi pada aspek lingkungan baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana siswa tersebut tinggal. Jika lingkungan tersebut kurang mendukung maka akan sulit untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masing-masing siswa. Guru sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, namun apabila di rumah anak mendapatkan contoh yang kurang baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal anak, maka hal ini akan mempengaruhi hasil yang tidak signifikan terhadap penguatan nilai-nilai Pancasila.

Hal lain yang menjadi hambatan dalam penguatan pendidikan Pancasila adalah tingkat kemampuan dan kematangan emosional yang berbeda. Meskipun berdampak kecil, akan tetapi terdapat korelasi antara pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap usia siswa. Hal ini berhubungan dengan usia remaja dan tingkat kematangan psikologis. Tingkat usia remaja pada siswa dimulai pada usia 10-19 tahun, sedangkan usia siswa SMA pada umumnya berkisar 14-18 tahun. Data ini diperoleh berdasarkan klasifikasi usia/tingkatan umur, jumlah siswa di Sekolah Menengah Atas PABA Binjai yang secara rata-rata berusia 16 tahun.

Secara psikologis usia 14-18 tahun merupakan usia pencarian jati

diri dengan ditandai dengan kritikan atau bantahan terhadap nasehat yang diberikan kepada guru atau orang tua.

Disamping itu juga karakter siswa yang berbeda. Berdasarkan observasi lapangan, ada beberapa anak yang sulit dinasehati, hal ini tentunya akan menyulitkan guru dalam mengarahkan siswa untuk dapat memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila, sehingga upaya untuk menasehati dilakukan secara berulang-ulang ketika siswa melakukan perbuatan yang menyimpang.

Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan pembiasaan di sekolah, diingatkan atau himbauan, teguran, dan dilakukan pembinaan oleh sekolah. Anak setiap hari di biasakan di sekolah agar dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan berbagai kegiatan. Selain itu, guru juga selalu berusaha untuk terus mengingatkan dan menasehati siswa yang bertindak melanggar nilai-nilai Pancasila.

Pengaruh media sosial juga berperan aktif sebagai penghambat dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, hal ini disebabkan kebebasan akses data informasi yang cepat sehingga kemampuan untuk memilah informasi perlu ditingkatkan. Penggunaan *smartphone* sebagai alat komunikasi berfungsi sebagai pencarian informasi, apakah informasi tersebut bermanfaat kepada siswa atau hanya sekedar sebagai perangkat hiburan yang mudah dibawa kemana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 85% atau 144 dari 170 responden menyatakan pengguna aktif

*smartphone*. Hasil wawancara dengan beberapa guru bidang studi, penggunaan *smartphone* untuk akses data tidak dapat dicegah, karena untuk meningkat pe-ngetahuan siswa, dianjurkan untuk mencari informasi dari berbagai media termasuk internet. Ini tentu saja di luar dikendali pihak sekolah, sehingga siswa tidak tutup kemungkinan dapat mengakses data-data yang bersifat tidak layak atau bersifat kontroversi

Kendala lain adalah upaya untuk meminimalisir penggunaan *Smartphone* sebagai media informasi, sekolah juga melakukan pemeriksaan dan pelarangan untuk membawa *Smartphone*, namun upaya tersebut kurang efektif, karena justru membuat siswa merasa tidak bebas mencari data yang dibutuhkan meskipun sudah dilengkapi dengan buku atau lieteratur sekolah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penguatan Pendidikan Pancasila diperlukan sebagai upaya pencegahan nilai intoleransi yang berkembang di kalangan siswa/pelajar SMA. Sikap *Bullying*, mem-bedakan teman yang berbeda agama, menghina, suka mengganggu dan perlakuan tidak adil kerap terjadi pada siswa. Sikap dan perbuatan demikian ini dapat mengganggu kesadaran akan bertorelansi. Oleh karena upaya dilakukan untuk mengantisipasi sikap dan intoleransi dilakukan pendalaman kurikulum 2013 yang menitik beratkan pada upaya pengembangan siswa, dan budaya literasi sehingga menghasilkan peserta didik, mampu mengkritisi dan

mengadaptasi informasi yang masuk serta mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila pada siswa.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

- 1) Guru sebagai peran sentral pendidikan diharapkan dapat terus meningkatkan upaya dalam meningkatkan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran.
- 2) Lingkungan sosial masyarakat hendaknya mendukung penerapan nilai-nilai pancasila sebagai upaya penguatan persatuan bangsa dan mencegah sikap dan perilaku atau tindakan yang dapat menyebabkan intoleransi. sebab bangsa indonesia merupakan bangsa yang majemuk.
- 3) Peran keluarga khususnya orang tua, dalam mengawasi anak menggunakan teknologi informasi seperti *Smartphone* atau media internet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suharyono. 2014, Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam membina Sikap Toleransi Antar Siswa. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1 (2) (2013): 192-203. Tersedia <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Fidiyani, Rini, 2013, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa*

- Cikakak, Kec. Wangon Kab. Banyumas*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol 13 No. 3 Hal. 469-482. Tersedia : <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/> Diakses 06 Juni 2017
- Halili. 2017."Angka Pelanggaran Kebebasan Beragama 2017". Tersedia <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/> Diakses 14 Mei 2018
- I Made Ngurah Surangga, Mendidik Lewat Literasi Untuk Pendidikan Berkualitas JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017, Hal 154-163. Tersedia <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM> Diakses 23 September 2018.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma Offset. Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas. Purwastuti Rukiyati, L.A.,
- Dwikurniani, D., et al. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press
- The Wahid Institute*, Ringkasan eksekutif Laporan tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016 Wahid Foundation Tersedia: <http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Laporan-Tahunan-Wahid-Foundation-tahun-2016>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional.